

Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*)

Oleh: Yulita TS, Pusat Studi Urban Unika Soegijapranata Semarang

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin corrupt, yang berarti yang rusak/busuk, dan corruptio berarti membusuk atau pembusukan. Beberapa pendapat, korupsi diibaratkan sebagai gangren. Tidak terasa, namun menjalar, membusuk dan menggerogoti tubuh.

Korupsi diartikan sebagai salah satu bentuk kerusakan moral. Ahli sosiologi korupsi, Syed Husein Alatas mendefinisikan bahwa korupsi pada intinya adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, secara sederhana, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

2. Penyebab Korupsi¹

Pada intinya penyebab timbulnya korupsi adalah sifat egoisme manusia. Penyebab tindakan korupsi dapat dirumuskan sebagai sebuah persamaan :

$$C = N + K$$

Kriminal/Korupsi = Niat + Kesempatan

- N [niat] dapat dihubungkan dengan faktor moral, budaya, individu, keinginan, dsb;
- K [kesempatan] dapat dihubungkan dengan faktor sistem, struktur sosial, politik dan ekonomi, struktur pengawasan, hukum, permasalahan kelembagaan, dll.

Perpaduan berbagai faktor tersebut itulah yang menyebabkan korupsi. Artinya, apabila ada niat untuk melakukan korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka perbuatan korupsi tersebut tidak akan terjadi. Sebaliknya bila kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar tetapi niat untuk melakukannya sama sekali tidak ada, maka tindak korupsi juga tak akan terjadi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perpaduan masalah moral dan sistem. Keegoisme manusia menjadikan ia merubah sebuah sistem untuk kepentingan pribadi

Sedangkan menurut Robert Kilgart, tindakan korupsi dirumuskan sebagai:

¹ **5W + 1 H Korupsi** oleh Agam

Fatchurrochman, Kordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW).

$$C = M + D - A$$

Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability

Monopoly : Penguasaan ekonomis terhadap aset

Discretion : Kewenangan mengelola aset

Accountability : Pertanggungjawaban

3. Bentuk/Jenis Korupsi

Bentuk korupsi dilihat dari skalanya dibagi 2:

- a. Petty Corruption: korupsi kecil-kecilan
- b. Grand Corruption: mega korupsi

Berdasar sifatnya:

- a. Episodic corruption
- b. Systemic Corruption

Dilihat dari hubungannya dengan pihak yang dilibatkan dibagi menjadi 2:²

- a. Korupsi eksternal, yaitu korupsi yang dilakukan seseorang dalam berhubungan dengan pihak luar lembaganya. Contohnya adalah:
 - Pembayaran untuk jasa-jasa wajib, yaitu uang pelicin atau tambahan uang untuk melancarkan jasa yang seharusnya dilakukan tanpa biaya atau dengan biaya resmi yang kecil.
 - Pembayaran bagi jasa-jasa yang tidak halal. Jenis ini adalah uang yang dibayarkan untuk dilakukannya suatu pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pembayar.
 - Pungutan uang untuk menjamin agar seseorang tidak dirugikan. Model ini memanfaatkan ketidaktahuan orang mengenai sesuatu/*information assymetry*, sehingga orang yang mempunyai informasi dapat meminta uang atas jasa yang dilakukan dengan informasi tersebut.
- b. Korupsi internal, korupsi yang dilakukan seseorang [suatu pihak] dalam lingkup lembaganya sendiri. Contoh bentuk ini adalah:
 - Penggelapan melalui pemalsuan catatan. Yang dilakukan adalah membuat catatan palsu yang dapat memberinya keuntungan atas catatan tersebut.

- Mencetak label dan materai secara berlebihan. Korupsi jenis ini dilakukan dengan mencetak suatu dokumen atau leges palsu yang dapat dijual atau mendatangkan uang.
- Jual-beli jabatan. Jenis ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menentukan jabatan seseorang. Jenis ini dapat dilakukan melalui mekanisme sogokan, nepotisme dan untuk mendapatkan suatu jabatan.
- Menunda setoran, yaitu memperlambat masa penyeteroran dan dimanfaatkan untuk "diputar" terlebih dahulu,

Sedangkan menurut buku panduan dari KPK, jenis korupsi dibagi dalam beberapa kelompok:

- a. Korupsi yang merugikan keuangan negara
- b. Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap
- c. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan
- d. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang
- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi

4. Dampak Korupsi

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh korupsi³, menurut bidangnya:

- a. Dampak terhadap perekonomian
 - Memotong investasi dan produk nasional bruto
 - Mengikat persaingan bebas dan mengakibatkan perusahaan besar merusak perusahaan kecil
 - Penurunan daya saing, kualitas barang dan jasa buruk
 - Penurunan kepercayaan investor asing, perekonomian menurun
- b. Dampak terhadap pemerintahan negara
 - Investasi rendah, efisiensi kerja menurun
 - Mendorong demoralisasi pegawai, promosi tidak terkait dengan kualitas pekerjaan
 - Pemerintahan menjadi lemah dan terbatas
 - Keegoisan pejabat publik membayangkan bayangan pemikiran strategis kebutuhan negara, oleh karena itu, masalah ekonomi dan sosial kurangnya perhatian yang layak;

- kualitas pelayanan publik memburuk

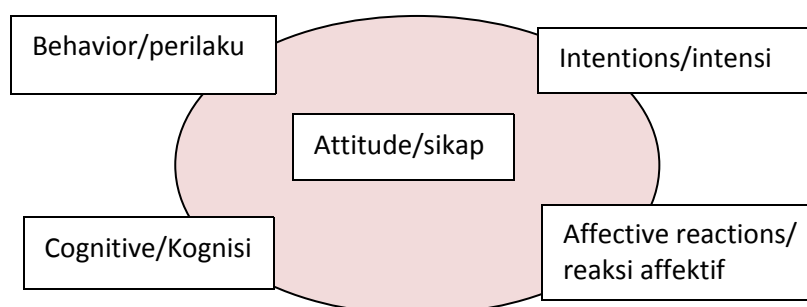
c. Konsekuensi Sosial Politik

- Ketidakpercayaan terhadap politisi dan pejabat publik, berarti kehilangan kepercayaan terhadap negara
- Masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan publik dan demokrasi
- Ketegangan sosial tumbuh dan stabilitas politik negara berkurang.
- Persaingan politik menjadi tidak sehat, orientasi lebih pada kelompok

5. Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

a. Mengapa perlu

Mencermati dampak korupsi seperti tersebut diatas, sepertinya dampak tersebut diatas juga terdeteksi di negara tercinta kita. Kalau di atas diibaratkan korupsi ibarat gangren, maka akan lebih mudah mengobati yang masih sedikit (kecil) atau mencegah sebelum terjadi. Muncul pertanyaan mulai kapan pendidikan antikorupsi harus dikenalkan kepada anak? Jawabnya adalah sejak anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pengembangan sikap (attitude development)⁴, dapat digambarkan sebagai berikut



Kelima elemen tersebut diatas saling terkait dan dapat saling tukar tempat. Suatu perubahan di satu elemen dapat mendorong perubahan yang lain. Misalnya, niat perilaku diubah dan perilaku dapat merubah kognisi, reaksi afektif dan sikap.

Tujuan dari pendidikan anti-korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi.

Untuk mencapai tujuan ini, siswa harus:⁵

- **Memahami informasi.** Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argumen ekonomi, sosial dan politik. Siswa tentunya akan sulit untuk memahami, untuk itu perlu 'diterjemahkan' ke dalam bahasa para siswa dengan menunjukkan bagaimana korupsi mengancam kepentingan mereka dan kepentingan keluarga dan teman-teman.
- **Mengingat.** Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat, namun jika yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa jenuh dan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi)
- **Mempersuasi (Membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis.** Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkannya dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran aktif.

Pengenalan pendidikan anti korupsi ini tentunya harus bertahap sesuai dengan usia anak. Berikut tabel dari Nucci, 2001, mungkin dapat menjadi salah satu acuan. Dilihat dari tabel diatas, usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 20 tahunan) pendidikan anti korupsi di tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korup.

b. Bagaimana Pendidikan anti korupsi diterapkan

Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

c. Mengapa pendidikan berbasis nilai menjadi penting

Dalam beberapa hari ini, harian Kompas mengulas tentang seminar Korupsi dan Pemiskinan. Jika dicermati dari tulisan, tulisan yang termuat dalam harian Kompas tersebut, maka akar dari korupsi yang membusukkan negara dan memiskinkan

rakyat tersebut terjadi karena kerusakan moral yang cukup parah dan mengakar yang seolah sudah membudaya pada para pejabat publik yang ada. Pada tulisan di Kompas, jumat, 11 Maret 2011, pembentukan karakter bangsa menjadi penting, dan pendidikan selama ini dirasa hanya berperan dalam mencerdaskan bangsa dalam ranah kognitif saja. Lalu bagaimana seharusnya?

Sudah saatnya bahwa pendidikan lebih diarahkan pada keseimbangan antara kecerdasan kognitif kecerdasan mental. Untuk itu pendidikan berbasis nilai (value based education) menjadi penting untuk dilakukan. Mendidik siswa yang utuh, pintar dan berkepribadian.

d. Nilai-Nilai apa yang perlu ditanamkan

Secara universal ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti:

- Kejujuran
- Kepedulian dan menghargai sesama
- Kerja keras
- Tanggungjawab
- Kesederhanaan
- Keadilan
- Disiplin
- Kooperatif
- Keberanian
- Daya juang/ kegigihan

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada insersi matapelajaran, tetapi perlu diberikan disemua lini pendidikan. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

e. Tugas Penting Guru dalam Pendidikan Anti korupsi di Sekolah

Guru adalah Garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknya lah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Anti Korupsi guru berperan dalam:

1. Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya
2. Mempromosikan sikan intoleransi terhadap korupsi
3. Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak)

4. Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan:

- Penanaman nilai-nilai
- Penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, memmanage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial disekolah-masyarakat- lingkungan, dll)

Dengan menghayati dan melaksanakan tugas ini, saya optimis Indonesia akan menjadi negara besar dan bersih, serta makmur dibawah pimpinan murid-murid yang bapak ibu didik)

6. Penutup

Tugas pendidikan antikorupsi adalah tugas semua orang. Kita bisa berperan aktif dalam porsinya dan kapasitas kita dalam memerangi korupsi di negeri ini.

Ada kemauan ada jalan.

****) Tulisan ini disarikan dari bahan training Value Based Education, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis.***